

**CONTENT ANALYSIS PEMBERITAAN KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI VERSUS POLRI DALAM SURAT KABAR HARIAN
SOLOPOS EDISI OKTOBER 2012**

NASKAH PUBLIKASI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Guna mencapai derajat

Sarjana S-1

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



PRABOWO BUDHI SANTOSO

A.220090024

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2013

PERSETUJUAN

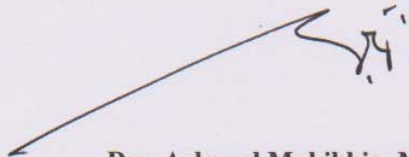
***CONTENT ANALYSIS* PEMBERITAAN KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI *VERSUS* POLRI DALAM SURAT KABAR HARIAN
SOLOPOS EDISI OKTOBER 2012**

Diajukan Oleh:

PRABOWO BUDHI SANTOSO
NIM A.220090024

Telah Disetujui untuk Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pembimbing



Drs. Achmad Muhibbin, M.Si
NIK. 411

ABSTRAK

CONTENT ANALYSIS PEMBERITAAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI VERSUS POLRI DALAM SURAT KABAR HARIAN SOLOPOS EDISI OKTOBER 2012

Prabowo Budhi Santoso, A220090024, Program Studi Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, xix + 176
Halaman (Termasuk Lampiran)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Content atau isi yang terkandung dalam pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi versus POLRI dalam surat kabar harian Solopos edisi Oktober 2012. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang penjabarannya dengan menggunakan analisis isi untuk mendapatkan makna yang terdapat dalam media surat kabar.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Pemberitaan perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri dimulai setelah terjadinya penyerbuan beberapa petugas Polisi dari Polda Bengkulu yang dibantu Polda Metro Jaya untuk menangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Kopol Novel Baswedan. Sebuah opini dapat menyatakan bahwa di dalam Kepolisian terdapat banyak oknum perwira menengah dan bahkan sampai para petinggi yang tidak pro terhadap pemberantasan korupsi. Itu artinya Kepolisian telah mencoreng mukanya sendiri. Penilaian negatif terhadap institusi Polri juga dapat dilihat dari penyerahan berkas perkara yang terkesan berbelit-belit. Penilaian lain dari kejadian ini, bahwa kasus simulator SIM tidak hanya dilakukan perwira Polisi saja namun secara keseluruhan melibatkan para petinggi-petinggi Polri. Adanya anggapan dalam menghambat penyidikan yang dilakukan oleh Polri memberi kesan bahwa institusi ini menjadi tempat para koruptor.

Kepolisian seharusnya bisa tanggap dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Sikap untuk ingin tetap menangani kasus simulator dianggap sebagai cara untuk melindungi dirinya sendiri. Perseteruan antara KPK versus Polri apabila diteruskan maka bisa dipastikan yang mendukung institusi KPK akan menang, apabila Presiden Susilo Bambang Yudoyono tidak melakukan tindakan yang cepat.

Kata Kunci: *Content Analysis*, Pemberitaan, KPK, Polri, Solopos.

Surakarta, 25 Januari 2013

Penulis

PRABOWO BUDHI SANTOSO

PENDAHULUAN

Media massa selain menjadi referensi bagi masyarakat juga digunakan untuk mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi. Fungsi media massa menurut Tondowodjojo (1986:12), “media massa hanyalah alat untuk menyampaikan berita yang dapat bernilai atau tidak sebagai komunikasi”. Media massa memiliki suatu nilai di dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Pemanfaatan informasi bagi masyarakat untuk melihat dunia luar yang tidak diketahuinya secara langsung. Meningkatnya kemampuan berpikir masyarakat menjadikan informasi sebagai data untuk kepentingannya. Perkembangan informasi mempengaruhi kehidupan masyarakat. Hal ini menjadikan informasi menjadi hal penting dalam kegiatan masyarakat. Kenyataannya banyak orang yang mencari informasi dengan berbagai cara seperti membaca berita surat kabar.

Masyarakat di dalam mencari informasi, salah satunya dengan mudah menerima apa yang sudah termuat dalam suatu surat kabar. Segala informasi yang diberikan surat kabar tersebut oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai fakta yang benar adanya. Karena hal itu, peneliti tertarik untuk menganalisis isi pemberitaan kasus Komisi Pemberantasan Korupsi *versus* Polri dalam harian umum Solopos edisi Oktober 2012. Melalui analisis isi, dengan harapan peneliti dapat mendeskripsikan apakah makna yang terkandung di dalam teks berita tersebut. Penggunaan analisis ini karena mengupas lebih dalam isinya.

Salah satu aparat pemberantas korupsi adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi atau lebih dikenal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Tanpa adanya peran Komisi Pemberantasan Korupsi di negara Indonesia kasus korupsi dapat menjadi semakin tidak terkendali. Pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi tidak terlepas dengan lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi mitra dalam penegakan hukum. Tanpa adanya peran kepolisian, pemberantasan korupsi tidak akan efektif.

Kasus Komisi Pemberantasan Korupsi *versus* Polri mendapat perhatian oleh masyarakat. Penarikan penyidik KPK menjadikan anggapan sebagai salah satu upaya pelemahan terhadap lembaga tersebut. Dukungan pun terus dilakukan

kepada pihak KPK yang merasa dilemahkan. Mulai dukungan yang bersifat nyata dengan mendatangi gedung KPK ataupun dukungan di dunia maya dengan membentuk group di *facebook*.

KAJIAN TEORI

1. *Content Analysis*

Istilah kata *content* berasal dari bahasa Inggris yang menurut Echols dan Shadily (1984:143) berarti “isi, daya, muat, kandungan”. *Content Analysis* yang dalam bahasa Indonesia berarti analisis isi menurut Krippendorff (1993:15) adalah “suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (replicabel) dan sah data dengan memperhatikan konteksnya”. Pengertian analisis tersebut, mengartikan bahwa penelitian ini sebagai pemrosesan data-data yang sudah ada secara ilmiah. Analisis isi merupakan sebuah alat di dalam suatu penelitian. Menurut Sarosa (2012:71) bahwa “*content analysis* adalah alat yang tepat untuk menganalisis teks yang sifatnya terus terang dan mengandung makna tersurat”. *Content Analysis* menganalisis data yang sudah ada.

2. Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang lebih dikenal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang didirikan untuk memberantas korupsi di Indonesia. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi adalah tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah “lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”. Sementara itu, tugas KPK sebagaimana yang diatur secara rinci dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yaitu:

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

3. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Polri merupakan lembaga Kepolisian nasional di Indonesia. Pengertian Kepolisian sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah “segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara memiliki tugas pokok, yaitu:

- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- Menegakkan hukum.
- Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

4. Indikator Pemberitaan Perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri

Indikator yang menjadi petunjuk analisis terhadap pemberitaan perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi *versus* Polri antara lain:

- a. Penyidikan kasus korupsi simulator SIM dengan tersangka Irjen Djoko Susilo.
- b. Keberadaan penyidik Kepolisian di KPK.
- c. Penangkapan penyidik Kopol Novel Baswedan.
- d. Pelemahan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi.

5. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang menjadi kajian dalam menjawab permasalahan penelitian. Menurut Surakhmad sebagaimana dikutip Arikunto (2006:65), “kerangka pemikiran atau anggapan dasar adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik”. Kerangka pemikiran berisi tentang hal-hal yang mencakup pokok pikiran yang memberikan gambaran permasalahan yang akan diteliti.

- a. Berita adalah “laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik dan atau penting bagi sebagian besar khalayak, melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media online internet” (Sumadiria, 2008:65). Adanya berita yang dilaporkan oleh media menjadi sumber informasi penting bagi masyarakat.
- b. Surat kabar harian adalah “penerbitan setiap hari atau sekurang-kurangnya enam kali dalam seminggu” (pasal 1 ayat (7) UU No.11 Tahun 1966).
- c. *Content Analysis* pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi *versus* Polri dimuat dalam surat kabar Solopos. Pelaksanaan analisis diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap makna yang terkandung dalam pemberitaan yang berkaitan dengan peristiwa KPK *versus* Polri.

METODE PENELITIAN

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah dan di tempat Kos, karena dalam melakukan analisis data dapat dilakukan dimana pun. Pelaksanaannya dilakukan sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Januari 2013.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menjabarkan isi berita dalam media massa. Penjabaran dengan menggunakan analisis isi dalam penelitian ini untuk mendapatkan makna yang terdapat dalam media surat kabar.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah berupa kumpulan teks berita yang telah diterbitkan oleh surat kabar harian umum Solopos. Adanya objek penelitian yang berwujud teks berita menjadikan penelitian ini tidak memiliki efek sosial karena objeknya bersifat pasif.

4. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dibentuk kliping berita Komisi Pemberantasan Korupsi *versus* Polri yang peneliti kumpulkan dari berita yang diterbitkan oleh harian umum Solopos.

5. Teknik Analisis Data

Fokus analisis penelitian ini adalah pada isi yang tersurat pada surat kabar harian, khususnya pada berita yang berkaitan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi *versus* Polri yang diterbitkan Solopos. Metode pengkajian yang digunakan dengan pendekatan kualitatif.

HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Harian Umum Solopos

Solopos berdiri sejak 19 September 1997. Harian umum Solopos merupakan surat kabar lokal yang terbit di Kota Surakarta. Wilayah pemasaran surat kabar ini meliputi seluruh karesidenan Surakarta serta beberapa kota di sekitar Surakarta. Para perintis surat kabar Solopos mengusahakan agar tampil baik dan lebih inspiratif dengan disesuaikan kebutuhan pembaca. Pada halaman pertama Solopos hadir dengan masalah politik, sosial, budaya yang berskala nasional. Untuk informasi yang berskala lokal disajikan pada sesi kedua. Para pembaca harian umum Solopos terbesar adalah dari wilayah Surakarta yaitu sekitar 30%, dengan latar belakang pendidikan adalah D4 atau S1. Saat ini Solopos Group berkembang dan memiliki anak perusahaan yang antara lain, PT Solo Grafika Utama dan Radio Solopos 97,75 FM. Perkembangan Solopos juga dapat dilihat dari semakin banyaknya iklan yang menggunakan jasa pada harian surat kabar tersebut.

2. Analisis Isi Berita

Dugaan adanya korupsi dalam pengadaan simulator SIM di Korlantas pada 2011 menjadi agenda bagi KPK. Proses penanganan terhadap adanya kasus simulator yang dilakukan oleh KPK dengan Polri terus diberitakan oleh media massa, bahkan sampai media massa di daerah. Hal ini, juga berlaku pada salah satu surat kabar yang berada di kota Surakarta yaitu harian umum Solopos. Polemik kedua lembaga ini semakin memanas ketika Kepolisian Daerah Bengkulu dibantu Polda Metro Jaya mendatangi gedung KPK untuk menangkap penyidik KPK yang berasal dari Polri. Upaya penangkapan dinilai sarat dengan berbagai kepentingan karena bersamaan dengan penanganan penyidikan kasus simulator SIM dengan tersangka Irjen Djoko Susilo. Berikut ini adalah uraian

berita yang berkaitan dengan perseteruan antara KPK dengan Polri yang diberitakan oleh Solopos.

Tabel berita KPK *versus* Polri bulan Oktober 2012 di harian umum Solopos

No	Edisi	Hal	Hari/ Tanggal	Judul Berita
1	Tahun XVI No. 18	1 & 7	Sabtu Pon, 6 Oktober 2012	Polisi Kepung Gedung KPK
2	Tahun XVI No. 19	1 & 8	Minggu Wage, 7 Oktober 2012	KPK Melawan Presiden Dinilai Abai
3	Tahun XVI No. 20	1 & 8	Senin Kliwon, 8 Oktober 2012	Presiden Tidak Tegas
4	Tahun XVI No. 21	1 & 8	Selasa Legi, 9 Oktober 2012	Kasus Simulator Milik KPK
5	Tahun XVI No. 22	1 & 8	Rabu Pahing, 10 Oktober 2012	Save KPK Perlu Dikawal
6	Tahun XVI No. 23 Lanjutan....	1 & 8	Kamis Pon, 11 Oktober 2012	Kasus Novel Baswedan Kapolri Lepas Tangan
7	Tahun XVI No. 24	1 & 8	Jum'at Wage, 12 Oktober 2012	Polri Serahkan 1 Berlanjut..... SIM ke KPK
8	Tahun XVI No. 25	1	Sabtu Kliwon, 13 Oktober 2012	Senin, KPK Mulai Terima Kasus Simulator
9	Tahun XVI No. 26	1 & 8	Minggu Legi, 14 Oktober 2012	Polri Bidik Penyidik Lain
10	Tahun XVI No. 27	1 & 2	Senin Pahing, 15 Oktober 2012	Kisruh Kasus Kopol Novel Polisi Dituding Membangkang
11	Tahun XVI No. 28	2	Selasa Pon, 16 Oktober 2012	Polri Belum Serahkan Berkas: Bareskrim ekspose kasus simulator SIM
12	Tahun XVI No. 29	2	Rabu Wage, 17 Oktober 2012	Polri Utamakan Simulator: kasus kopol novel belakangan
13	Tahun XVI No. 30	2	Kamis Kliwon, 18 Oktober 2012	KPK Minta Polri Legawa
14	Tahun XVI No. 31	2	Jum'at Legi, 19 Oktober 2012	Pemeriksaan Kedua Djoko Tak Jelas
15	Tahun XVI No. 32	2	Sabtu Pahing, 20 Oktober 2012	Polisi Menolak Disalahkan: Bareskrim gelar perkara kasus simulator
16	Tahun XVI No. 36	2	Rabu Legi, 24 Oktober 2012	Polri-KPK Bahas Teknis: Novel tangani lagi kasus SIM
17	Tahun XVI	1 & 7	Sabtu Wage, 27	Polisi Gugat KPK Rp. 425 M:

	No. 38		Oktober 2012	pengeledahan Korlantas sita dokumen diluar kasus
18	Tahun XVI No. 39	2	Minggu Kliwon, 28 oktober 2012	Korlantas Diduga Takut KPK Ungkap Kasus Lain
19	Tahun XVI No. 40	1 & 8	Senin Legi, 29 Oktober 2012	KPK Endus Gangguan Kasus Simulator
20	Tahun XVI No. 41	2	Selasa Pahing, 30 Oktober 2012	KPK Siapkan Sidang Gugatan Korlantas
21	Tahun XVI No. 42	2 & 8	Rabu Pon, 31 Oktober 2012	KPK Terima Berkas Kasus Simulator

Selama bulan Oktober 2012, Solopos memuat berita perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri. Pemberitaan perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri dimulai setelah terjadinya penyerbuan beberapa petugas Polisi dari Polda Bengkulu yang dibantu Polda Metro Jaya untuk menangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Kopol Novel Baswedan. Upaya penangkapan yang dilakukan dengan pengepungan gedung KPK dianggap sebagai pelemahan terhadap lembaga anti rasuah tersebut. Sebuah opini dapat menyatakan bahwa di dalam Kepolisian terdapat banyak oknum perwira menengah dan bahkan sampai para petinggi, ada yang tidak pro terhadap pemberantasan korupsi.

Para penyidik Polri yang sedang bertugas di lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi sebenarnya bukan orang yang tidak memiliki kesalahan, ada jejak dari riwayat pekerjaan yang sengaja disembunyikan oleh institusi Polri. Penyembunyian riwayat pekerjaan yang disembunyikan untuk membungkam para penyidik apabila kasus yang diusut melibatkan hampir secara keseluruhan petugas Polisi atau membahayakan institusi Polri maupun petinggi Polri. Kejadian kasus seperti itu terjadi pada kasus Novel Baswedan yang sudah diputuskan dalam sidang kode etik tahun 2004 tetapi akan ditangkap menjelang akhir tahun 2012 secara tiba-tiba karena menjadi penyidik kasus simulator SIM. Tindakan penjatuhan yang dilakukan oleh Kepolisian ini dianggap tidak adil.

Adanya pro dan kontra yang terjadi dalam tubuh Kepolisian tidak bisa dikendalikan oleh Kapolri Timur Pradopo, sebab seperti yang dinyatakan

Menkopolhukam Djoko Suyanto yang meminta Kapolri untuk menarik Polisi serta Provost Polri. Permintaan Menkopolhukam ternyata direspon oleh Kapolri bahwa tidak ada perintah untuk melakukan pengepungan oleh para polisi dan untuk menangkap penyidik KPK Novel Baswedan. Kejadian tersebut tidak menemukan titik temu siapakah yang memerintahkan. Kapolri atau Menkopolhukam yang sedang berbohong yang dikarenakan setelah melihat adanya reaksi para aktivis dan tokoh masyarakat pendukung Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan dukungan dengan mendatangi gedung tersebut. Kondisi para anggota Polri yang bergerak sendiri-sendiri yang dilakukan sesuai dengan kepentingan masing-masing kelompok yang berada di dalam Kepolisian menandakan bahwa institusi ini sangat lemah dan bobrok. Penilaian negatif terhadap institusi Polri juga dapat dilihat dari penyerahan berkas perkara yang terkesan berbelit-belit. Penilaian lain dari kejadian ini, bahwa kasus simulator SIM tidak hanya dilakukan perwira Polisi saja namun secara keseluruhan melibatkan para petinggi-petinggi Polri. Adanya anggapan dalam menghambat penyidikan yang dilakukan oleh Polri memberi kesan bahwa institusi ini menjadi sebagai tempat para koruptor. Hal ini bisa berbeda bila Kapolri maupun Wakapolri menyerahkan kasus simulator SIM kepada KPK bukan berputar-putar ke aturan hukum yang diyakininya.

Sikap ngotot untuk tetap menangani kasus simulator dianggap sebagai cara untuk melindungi dirinya sendiri. Kepolisian seharusnya tanggap terhadap perkembangan yang terjadi di masyarakat. Perseteruan antara KPK *versus* Polri apabila diteruskan maka bisa dipastikan yang mendukung institusi KPK akan menang, apabila Presiden Susilo Bambang Yudoyono tidak melakukan tindakan yang cepat.

Simpulan

Hasil analisis menunjukkan bahwa Pemberitaan perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri dimulai setelah terjadinya penyerbuan beberapa petugas Polisi dari Polda Bengkulu. Sebuah opini dapat menyatakan bahwa di dalam Kepolisian terdapat banyak oknum perwira menengah dan bahkan

sampai para petinggi ada yang tidak pro terhadap pemberantasan korupsi. Itu artinya Kepolisian telah mencoreng mukanya sendiri. Penilaian negatif terhadap institusi Polri juga dapat dilihat dari penyerahan berkas perkara yang terkesan berbelit-belit. Penilaian lain dari kejadian ini, bahwa kasus simulator SIM tidak hanya dilakukan perwira Polisi saja namun secara keseluruhan melibatkan para petinggi-petinggi Polri. Adanya anggapan dalam menghambat penyidikan yang dilakukan oleh Polri memberi kesan bahwa institusi ini menjadi tempat para koruptor.

Saran

Setelah melakukan analisis isi dalam penelitian ini, ditemukan beberapa keterbatasan. Untuk itu, berikut ini adalah beberapa saran yang dapat digunakan sebagai koreksi dan acuan pada penelitian yang lain, khususnya penelitian mengenai analisis isi berita pada suatu media cetak.

1. Kepada pembaca atau penikmat media cetak, diharapkan dalam mendapatkan informasi yang telah disajikan oleh media agar lebih selektif dan kritis dalam memaknai isi berita yang disajikan. Karena realitas atau fakta yang dikemas dalam suatu teks berita bukan lagi lengkap dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, melainkan telah melalui tahap-tahap dan penonjolan serta adanya kepentingan-kepentingan yang diharapkan dalam pemberitaannya.
2. Kepada peneliti lain, penelitian mengenai analisis suatu teks berita sesungguhnya dapat ditempuh dengan beberapa tahapan agar dapat memperoleh suatu hasil analisis yang lebih mendalam. Semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk melaksanakan penelitian agar lebih berkembang.
3. Kepada Guru Pendidikan Kewarganegaraan dengan penelitian ini diharapkan menjadi keberhasilan pengajaran terutama dalam memberikan contoh kasus yang terkait dengan materi pelajaran serta menjadi masukan dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Dimana informasi yang didapatkan dari media massa guru dapat lebih mudah memberikan gambaran yang sesuai dengan materi pelajaran dengan kejadian yang aktual.
4. Kepada Harian Umum Solopos, diharapkan lebih cermat dalam menyusun dan memberikan sajian berita, sehingga informasi yang ditampilkan lebih jelas.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Echols, John M dan Hassan Shadily. 1984. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Klippendorff, Klaus. 1993. *Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sarosa, Samiaji. 2012. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Jakarta: Indeks.
- Sumadiria, AS Haris. 2008. *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalistik Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Tondowidjojo. JVS CM. 1985. *Media Massa dan Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.